



**PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN OLEH KANTOR
KESBANGPOL (KESATUAN BANGSA DAN POLITIK) BAGI SISWA
SMA/SMK DI KABUPATEN MAJALENGKA**

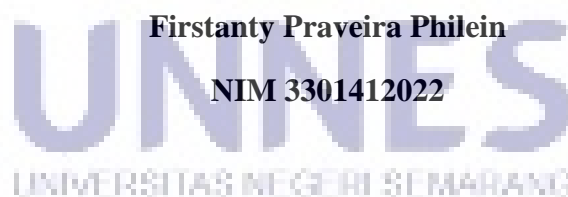
SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh

Firstanty Praveira Philein

NIM 3301412022



JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia

Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari :  Senin

Tanggal : 30 Mei 2016

Pembimbing Skripsi I



Drs. Tijan, M.Si

NIP. 196211201987021001

Pembimbing Skripsi II




Noorochmat Isdaryanto, S.S., M. Si

NIP: 197112042010121001

Mengetahui

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan


UNNES
Drs. Tijan, M.Si
NIP: 196211201987021001
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 10 Juni 2016

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Drs. Ngabiyanto, M.Si
NIP. 196501031990021001

Drs. Tijan, M.Si
NIP.196211201987021001

Noorochmat Isdaryanto, S.S.,M.Si
NIP. 197112042010121001

Mengetahui:

Dekan,



Drs. Mojis Soehatul Mustofa, M.A
NIP 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Juni 2016



Firstanty Praveira Philein

NIM 3301412022



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Q.S Al-Insyirah: 6).
- ❖ Senantiasa belajar dan bekerja keras tanpa menyerah untuk meraih keberhasilan.
- ❖ Sabar dalam menghadapi kesulitan dan bijaksana dalam mengatasinya.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kampusku tercinta Universitas Negeri Semarang Fakultas Ilmu Sosial.
2. Jurusan kebanggaan saya Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
3. Kedua orangtuaku tercinta Ayahanda Pahrudin dan Ibunda Peni Irmawati yang selalu memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, dan doa, serta dukungan, baik dukungan moral dan materi.
4. Mamah Elizabeth Soplantila dan Abah Slamet Karmawiratma tercinta yang selalu memberikan kasih sayang dan nasihatnya.
5. Adikku tersayang Famelsha Kezia Ratubelsjan yang telah menjadi penyemangat.
6. Dosen Pembimbing Drs. Tijan, M.Si dan Noorochmat Isdaryanto, S.S., M.Si yang selalu memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini.
7. Keluarga besar yang telah memberikan dukungan.
8. Sukur Kusuma Tama yang senantiasa memberikan dukungan.
9. Teman-teman Kost Y, Aziz, Dila, Juju, dan Rahmah.
10. Sahabat terbaikku Deny dan Gisel.

SARI

Firstanty Praveira Philein. 2016. *Pembinaan Wawasan Kebangsaan Oleh Kantor Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) Bagi Siswa SMA/SMK di Kabupaten Majalengka*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Drs. Tijan, M.Si, Noorochmat Isdaryanto, S.S., M.Si. 226 halaman.

Kata Kunci: Pembinaan, Wawasan Kebnagsaan

Di era globalisasi ini wawasan kebangsaan menjadi sangat penting untuk dimiliki oleh masyarakat termasuk siswa sebagai generasi muda. Maka perlu adanya upaya menanamkan, menumbuhkan, dan memelihara wawasan kebangsaan masyarakat melalui pembinaan di lingkungan masyarakat dan sekolah. Oleh sebab, itu Kantor Kesbangpol Kabupaten Majalengka mengadakan pembinaan wawasan kebangsaan bagi siswa SMA/SMK di Kabupaten Majalengka untuk membentuk karakter siswa menjadi lebih baik dan meningkatkan wawasan kebangsaan siswa.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Fokus penelitian yaitu pelaksanaan, kesan siswa, dan faktor penghambat dalam kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan. Sumber data diperoleh dari informan, peristiwa, dan dokumen. Data dijaring dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi. Data dianalisis dengan interaktif melalui langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan oleh Kantor Kesbangpol bagi siswa SMA/SMK di Kabupaten Majalengka diadakan lintas instansi, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Kodim 0617 Majalengka, Polres Majalengka. Kegiatan tersebut dilaksanakan di dalam dan di luar ruangan. Di dalam ruangan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Sedangkan di luar ruangan menggunakan metode *outbound* dan Peraturan Baris Berbaris. Materi yang disampaikan diantaranya adalah bela negara, pembinaan rohani, penanggulangan dampak negatif pengaruh penggunaan narkoba bagi generasi muda, cinta tanah air, materi pembinaan lapangan Peraturan Baris Berbaris, *outbound*, jaring laba-laba, jaring pendarat, pengenalan alat penolong dini, pengembangan diri, dan renungan malam; (2) Kesan siswa terkait waktu pelaksanaan sudah sesuai, metode yang paling berkesan adalah *outbound*, materi yang dianggap memerlukan pemahaman yang lebih adalah materi UUD 1945; (3) Faktor penghambat kegiatan diantaranya kurangnya prasarana dan sarana pendukung.

Saran yang diberikan penulis adalah (1) bagi Kantor Kesbangpol hendaknya lebih meningkatkan komunikasi serta kerjasama dengan pihak sekolah dan Kodim 0617 Majalengka dalam hal pengamanan dan membuat peraturan kegiatan yang lebih tegas, dan dalam pembelajaran di kelas siswa dapat di bagi menjadi beberapa kelompok sehingga penyampaian kegiatan lebih efektif; (2) bagi sekolah hendaknya ikut berperan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ikut memantau siswa saat mengikuti kegiatan. Sekolah juga dapat membantu menyediakan prasarana ruangan, dan MCK sementara untuk memenuhi prasarana MCK bagi 400 siswa peserta kegiatan, selain itu menyediakan sarana *microphone*, *sound system*, dan alat pendingin ruangan.

ABSTRACT

Firstanty Praveira Philein.2016. *National builder concept at KESBANGPOL office (The Unity of Nation and Politics) for students at senior high school and vocational school at Majalengka regency.* Under graduated thesis. Departement of Politics and Citizenship. Faculty of Social Science. Semarang State University. Drs. Tijan, M.Si, Noorochmat Isdaryanto, S.S., M.Si. 226 pages

Keywords: Build, National Concept

In globalization era nation concept is being important for society included student as young generation. So it is need an effort to plant, growth, and keep a nation concept through builder around society and school. Because of that KESBANGPOL office Majalengka regency should be organize to build nation concept for student in senior high school or vocational school at Majalengka regency to make the best students character and arise students nation concept.

Research method is qualitative. The researches focus on implementation, student impression and inhibiting factor of activity nation concept builder. Data resources get from the informant, event and document. Data is gets by observation, interview and documentation. Validity of data was experimented by triangulation. Analysis of data by interactive through some step are Resource of data, reduction data, serve of data, conclusion, and verification.

Result of experiment (1) National concept activities builder for student senior high school and vocational school by Kesbangpol at Majalengka Regency was held by cross instance are Dinas Pendidikan Majalengka regency, Kementerian Agama Majalengka regency, KODIM 0617 Majalengka, and Polres Majalengka. The activities were held indoor and outdoor. At indoor uses lecturer method, discussion and question answer. At outside activity was used outbound method and regulations marching. The materials are save the country, religion builder, cope causes side effect of drugs to young generation, loves the country, the material builder at the field are regulations marching, outbound, spider net, landing net, knowing the tools for the first aid, self different, and night reflections; (2) Student impression for the time of activity was suitable, the best impression method is outbound, the weak material which is need to understand is UUD 1945; (3) inhibiting activities factor are lack of tool and support tool.

Writer suggestion are: (1) For Kesbangpol office is more arise communication and cooperation with school and KODIM 0617 Majalengka on case of safety and emphasis of activity likes join observe the student to join the activity, and and in the classroom students can be divided into several groups so that more effective delivery of activities; (2) School can help to serve toilet to fulfill the infrastructure for 400 students as participant of the activity, besides providing a means of microphone, sound system and air conditioner.

PRAKATA

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rohman. M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menimba ilmu di Perguruan Tinggi.
2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah mengelola akademik, kemahasiswaan dan sarana prasarana perkuliahan.
3. Drs. Tijan, M.Si, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan serta masukan demi kelancaran tugas akhir ini.
4. Noorochmat Isdaryanto, S.S., M. Si, Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan arahan serta masukan demi kelancaran tugas akhir ini.
5. Drs. Ngabiyanto, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Nana Rusmana Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Majalengka dan narasumber yang telah memberi izin penelitian serta memberi informasi demi kelancaran penyusunan tugas akhir ini.
7. Bapak Dadang Nugraha Kasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik dan narasumber yang telah memberi informasi demi kelancaran penyusunan tugas akhir ini.
8. Bapak Doni Hariyono Staff Penyelenggaraan Pendidikan Politik dan narasumber yang telah memberi informasi demi kelancaran penyusunan tugas akhir ini

9. Bapak Nana Surjana, S.Pd Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Palasah yang telah memberi izin penelitian serta memberi informasi demi kelancaran penyusunan tugas akhir ini.
10. Bapak Asep Bambang Supriatma, S.E dan Bapak Nana Mariana, S.Pd., MM, guru SMK Negeri 1 Palasah dan narasumber yang telah memberikan informasi demi kelancaran penyusunan tugas akhir ini.
11. Seluruh pihak SMK Negeri 1 Palasah yang telah membantu demi kelancaran penyusunan tugas akhir ini.
12. Bapak Udin Wahyudin, S.Pd., M.Si Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Maja yang telah memberi izin penelitian serta memberi informasi demi kelancaran penyusunan tugas akhir ini.
13. Ibu Wiji Rahayu, S.Pd guru SMK Negeri 1 Maja dan Bapak Aripudin Staff Tata Usaha SMK Negeri 1 Maja dan narasumber yang telah memberikan informasi demi kelancaran penyusunan tugas akhir ini.
14. Seluruh pihak SMK Negeri 1 Maja yang telah membantu demi kelancaran penyusunan tugas akhir ini.
15. Teman-teman seperjuangan Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2012 yang senantiasa memberikan pemikiran-pemikiran maupun saran selama proses penulisan tugas akhir ini
16. Berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, mudah-mudahan amal baiknya mendapat pahala dari Allah SWT.

Semoga seluruh bantuan yang telah diberikan menjadi amal baik yang akan mendapat pahala dari Allah SWT, dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, Juni 2016

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SARI	vi
ABSTRACT	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Batasan Istilah	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR	
A. Deskripsi Teoretis	13

1. Pembinaan	13
2. Wawasan Kebangsaan.....	15
a. Pancasila	17
b. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.....	23
c. Bhinneka Tunggal Ika	25
d. Negara Kesatuan Republik Indonesia	28
3. Pentingnya Wawasan Kebangsaan.....	29
a. Radikalisme	31
b. Kenakalan Remaja.....	32
c. Seks Bebas.....	34
d. Penyalahgunaan Narkoba	36
4. Pembinaan Wawasan Kebangsaan.....	37
5. Kantor Kesbangpol Kabupaten Majalengka	45
B. Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan	51
C. Kerangka Berpikir	53
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Latar Penelitian	57
B. Fokus Penelitian	57
C. Sumber Data	58
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	60
E. Uji Validitas Data	65
F. Teknik Analisis Data	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	70
1. Gambaran Umum Kantor Kesbangpol Kabupaten Majalengka.....	70
a. Sejarah Kantor Kesbangpol Kabupaten Majalengka.....	70
b. Letak Geografis	71
c. Visi dan Misi Kantor	72
d. Struktur Organisasi	75
e. Program dan Kegiatan	76
2. Gambaran Umum SMK Negeri 1 Palasah	78
a. Sejarah SMK Negeri 1 Palasah	78
b. Letak Geografis	79
c. Visi dan Misi Sekolah	79
d. Tujuan Sekolah.....	80
3. Gambaran Umum SMK Negeri 1 Maja	80
a. Sejarah SMK Negeri 1 Maja	80
b. Letak Geografis.....	82
c. Visi dan Misi Sekolah	82
d. Tujuan Sekolah.....	83
4. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan oleh Kantor Kesbangpol bagi Siswa SMA/SMK di Kabupaten Majalengka.....	84
a. Kelayakan Program	84
b. Tujuan Pelaksanaan	90
c. Pelaksanaan	96

1) Tahap Persiapan	97
2) Tahap Pelaksanaan	111
3) Evaluasi	120
5. Kesan Siswa SMA/SMK di Kabupaten Majalengka setelah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan oleh Kantor Kesbangpol.....	124
a. Kesan Siswa SMK Negeri 1 Palasah dalam Melakukan Persiapan Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Tahun 2014	127
b. Kesan Siswa SMK Negeri 1 Maja dalam Melakukan Persiapan Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Tahun 2015	131
c. Kesan Siswa SMK Negeri 1 Palasah dalam Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan.....	134
d. Kesan Siswa SMK Negeri 1 Maja dalam Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan.....	138
6. Faktor Penghambat dalam Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan oleh Kantor Kesbangpol bagi Siswa SMA/SMK di Kabupaten Majalengka.....	142
a. Hambatan dalam Menentukan Lokasi dan Sasaran Kegiatan	143
b. Hambatan dalam Bentuk Kegiatan atau Metode	145
c. Hambatan Prasarana dan Sarana	147
d. Letak Sekolah	149
B. Pembahasan	149
1. Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	149

a.	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dilaksanakan Lintas Instansi	149
b.	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dilaksanakan Melalui Kegiatan Ceramah, Diskusi, Tanys Jawab, <i>Outbound</i> , dan PBB	156
	1) Bentuk Kegiatan Ceramah.....	156
	2) Bentuk Kegiatan Diskusi.....	157
	3) Bentuk Kegiatan Tanya Jawab	158
	4) Bentuk Kegiatan <i>Outbound</i>	159
	5) Bentuk Kegiatan PBB	159
c.	Waktuk Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan pada Libur Semester dan Hari KBM.....	160
d.	Metode yang Dilaksanakan di Dalam Ruangan dan di Luar Ruangan.....	161
2.	Kesan Positif Siswa Dalam Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan	164
3.	Kurangnya Prasarana dan Sarana Pendukung Pembinaan Wawasan Kebangsaan	171

BAB V PENUTUP

A.	Simpulan	174
B.	Saran	175

DAFTAR PUSTAKA	177
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	182
--------------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah siswa SMK Negeri 1 Palasah Tahun Pelajaran 2015-2016 berdasarkan agama	94
Tabel 2 Jumlah siswa SMK Negeri 1 Maja Tahun Pelajaran 2015-2016 berdasarkan agama	95
Tabel 3 Jumlah siswa SMK Negeri 1 Maja Tahun Pelajaran 2015-2016	102
Tabel 4 Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan	123
Tabel 5 Kesan siswa SMK Negeri 1 Maja terkait materi yang disampaikan.....	124
Tabel 6 Kesan siswa SMK Negeri 1 Maja terkait bentuk kegiatan (metode) yang digunakan.....	126



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Gedung Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Majalengka	72
Gambar 2: Siswa SMK Negeri 1 Palasah	93
Gambar 3: Siswa SMK Negeri 1 Maja	93
Gambar 4: Siswa SMK Negeri 1 Palasah beribadah.....	94
Gambar 5: Kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 1 Maja.....	94
Gambar 6: Kedatangan Bupati Kabupaten Majalengka pada kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan di SMK Negeri 1 Maja.....	109
Gambar 7: Kedatangan Bupati Kabupaten Majalengka pada kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan di SMK Negeri 1 Maja.....	109
Gambar 8: Penyampaian materi di dalam ruangan	114
Gambar 9: Kegiatan <i>outbound</i>	115
Gambar 10: Peserta yang mendapat tempat di luar ruangan.....	148

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Struktur Organisasi Kantor Kesbangpol Kabupaten Majalengka.....	49
Bagan 2: Kerangka berpikir	57
Bagan 3: Model Interaktif Analisis Data	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jumlah SMA/SMK di Kabupaten Majalengka.....	183
Lampiran 2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka	185
Lampiran 3 Reduksi Data Wawancara.....	186
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian.....	223
Lampiran 5 Surat Bukti Melaksanakan Penelitian.....	226



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terkait wawasan kebangsaan, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Cahyo Budi Utomo dalam (Soegito, 2013:127) banyak kalangan yang melihat perkembangan politik, sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Bahkan, kekuatiran itu menjadi semakin nyata ketika menjelajah pada apa yang dialami oleh setiap warganegara akhir-akhir ini, yakni memudarnya wawasan kebangsaan.

Dewasa ini kecintaan dan kebanggaan kepada bangsa dan tanah air Indonesia semakin memudar, bahkan rasa nasionalisme dikhawatirkan bisa lenyap seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu contoh mulai memudarnya kecintaan dan kebanggaan kepada bangsa dan tanah air Indonesia sekarang ini adalah adanya sekelompok ABG yang berpose foto menginjak patung pahlawan di Simalungun, Sumatera Utara. Hal tersebut disayangkan oleh Ketua MPR

RIZulkifli Hasan yang mengatakan dalam (<http://news.detik.com/berita/3206420/abg-berpose-injak-patung-pahlawan-ketua-mpr-wawasan-kebangsaan-memudar> diakses Minggu, 12 Juni 2016, 20:25 WIB) bahwa belum lama ini pelecehan lambang negara sudah dilakukan bahkan oleh seorang artis dan itu sangat memprihatinkan. Baru-baru ini Indonesia dikejutkan dengan para ABG yang berpose di atas patung pahlawan tanpa menunjukkan rasa hormat sama sekali.

“Ada Zaskia Gotik, kemudian remaja yang tidak menghargai pahlawan, itu lampu merah bagi bangsa agar mengingatkan untuk segera melalaikan pendidikan kebangsaan secara masif sesuai perkembangan zaman,” kata Zulkifli kepada detikcom di sela Safari Kebangsaan di Jawa Tengah, Senin (6/5/2016).

Terjadinya pemudaran terhadap kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara Indonesia salah satu penyebabnya adalah pengaruh dari globalisasi seperti akibat kemajuan dalam bidang telekomunikasi, transportasi, dan media cetak maupun elektronik telah merubah tata kehidupan masyarakat Indonesia.

Globalisasi tidak mungkin dihindari dan mustahil kita bisa lari setapakpun darinya. Globalisasi menuntut kualitas yang pada hakekatnya bertujuan meningkatkan harkat dan martabat manusia (Amin, 2011:223). Jadi dapat ditarik kesimpulan apabila globalisasi dihadapi dengan kualitas yang baik akan memberikan modal positif bagi hidup masyarakat Indonesia, tetapi

apabila sebaliknya akan berakibat berubahnya tata kehidupan masyarakat dan menurunnya wawasan kebangsaan masyarakat.

Globalisasi yang tidak dihadapi dengan baik tidak hanya mempengaruhi kultur budaya bangsa, namun juga mempengaruhi wawasan kebangsaan masyarakat yang saat ini mulai mengalami penurunan. Seperti diketahui bahwa di era globalisasi ini wawasan kebangsaan menjadi sangat penting untuk dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Maka perlu adanya upaya menanamkan, menumbuhkan, dan memelihara wawasan kebangsaan masyarakat baik melalui pendidikan atau pembinaan di lingkungan masyarakat dan sekolah. Dengan demikian masyarakat memiliki benteng yang kuat dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan dapat mempertahankan eksistensi wawasan kebangsaan Indonesia.

Untuk mewujudkan pengembangan wawasan kebangsaan yang lebih mantap, sudah banyak lembaga swasta apalagi lembaga resmi pemerintah yang berperan dalam mengadakan pembinaan wawasan kebangsaan. Diantaranya yaitu Pemerintah Daerah yang wajib menyelenggarakan pendidikan atau pembinaan wawasan kebangsaan. Salah satu lembaga resmi pemerintah yang menyelenggarakan pembinaan wawasan kebangsaan adalah Kantor Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) Kabupaten Majalengka. Dengan didasarkan misi Kantor Kesbangpol Kabupaten Majalengka yang salah satu poinnya berbunyi: “Mewujudkan kemampuan, kekuatan, dan kemauan masyarakat untuk memelihara dan mempertahankan Negara kesatuan Republik Indonesia”, Kantor Kesbangpol Kabupaten Majalengka

mempunyai program pengembangan wawasan kebangsaan dengan indikator kegiatannya yaitu pemantapan pemahaman wawasan kebangsaan pada tahun 2016 (<http://kesbangpol.majalengkakab.go.id/program-dan-kegiatan/> diakses pada 12 Januari 2016).

Dengan dilatar belakangi oleh pemikiran bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan serta mewujudkan sistem politik yang demokratis sebagai tantangan utama yang akan dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia kedepan, Kantor Kesbangpol Kabupaten Majalengka mewujudkan program dan kegiatan tersebut dengan fokus perhatian pembinaan pemantapan pemahaman wawasan kebangsaan kepada siswa di sekolah-sekolah menengah yang ada di Kabupaten Majalengka.

Fokus perhatian yang ditujukan kepada siswa didasari dengan alasan karena kenyataannya saat ini, siswa yang merupakan pemuda Indonesia mulai mengalami krisis wawasan kebangsaan. Seperti yang dikatakan oleh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro, Puji Astuti, saat menjadi narasumber Seminar, Talkshow dan Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Hotel Candisari Karanganyar dalam (<http://www.kebumenekspress.com/2015/10/pemuda-alami-krisis-wawasan-kebangsaan.html> diakses Jumat, 29 Januari 2016, 19.48 WIB).

“Sejak krisis 1998 pemuda Indonesia mengalami krisis wawasan kebangsaan. Generasi muda kehilangan keikhlasan dalam berbangsa dan bernegara. Semua diukur dengan hal-hal yang bersifat materi. Selain itu muncul ancaman serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta ancaman terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Seperti konflik sosial yang terus menerus, menurunnya sikap sopan santun dan tata krama dalam pergaulan sosial. Melemahnya kejujuran dan juga

pembangkangan dan ketidakpatuhan terhadap berbagai aturan-aturan norma dan hukum”.

Selain itu alasan lain pemuda harus dibimbing tentang wawasan kebangsaan karena sesuai dengan yang dikatakan oleh Ali Baal Masdar sebagai pemateri dalam sosialisasi bela negara dan wawasan kebangsaan di Gedung Gadis Nusantara, Kelurahan Pekkabata, Polewati, Senin (23/5/2016) bahwa pemuda harus ikut andil dan berperan penting dalam mensukseskan semua Program Pemerintah, karena dalam panutan bela negara dan wawasan kebangsaan ini, pemuda itu harus selalu terdepan karena dia merupakan generasi cikal bakal bangsa.

Oleh sebab itu wawasan kebangsaan sangat penting untuk dibina kepada pemuda, supaya dapat membentuk pemuda sebagai manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreatifitas dan tanggung jawab, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia. Selain itu pemuda sebagai generasi penerus bangsa dapat meneruskan perjuangan untuk mencapai tujuan bangsa.

Tetapi apabila pendidikan wawasan kebangsaan tidak dilakukan, pemuda akan lupa jati diri mereka sebagai bangsa Indonesia. Selain itu, akan membentuk sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antarperilaku sesama warga. Dengan adanya individualisme maka orang tidak akan peduli dengan kehidupan bangsanya. Pemuda kedepannya bisa mendapatkan berbagai masalah, seperti tawuran, seks bebas, penyalahgunaan

narkoba dan sebagainya. Bahkan saat inipun masalah-masalah tersebut sudah terlihat jelas. Yang lebih mengkhawatirkannya lagi para pemuda banyak yang menganggap bahwa masalah tersebut adalah masalah yang sudah lumrah dan biasa terjadi di kalangan pemuda.

Menurut Eko Handoyo dalam (Soegito, 2013:71) mengemukakan bahwa:

Pemuda memiliki tanggung jawab besar terhadap keberlangsungan kehidupan bangsa. Dalam UU Nomor 40 Tahun 2009, tanggung jawab pemuda meliputi: (1) menjaga Pancasila sebagai Ideologi negara; (2) menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; (4) melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum; (5) meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat; (6) meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan (7) meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Karena tanggung jawabnya yang besar, siswa sebagai pemuda terpelajar harus dididik agar mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya, memiliki kepribadian tinggi, semangat nasionalisme, mampu memahami pengetahuan dan teknologi untuk bersaing secara global karena siswa merupakan pemuda atau generasi muda harapan dan pemilik masa depan Indonesia. Merekalah yang akan mewarisi dan melanjutkan perjuangan bangsa kedepannya.

Oleh karena itu masyarakat sangat mendambakan generasi mudanya dipersiapkan untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negaranya (Budimansyah, 2007:11). Persiapan tersebut dapat dilakukan dengan pembinaan wawasan kebangsaan kepada diri siswa sebagai generasi muda. Maka dari itu sangat sesuai sekali dengan menjadikan siswa sebagai

fokus perhatian dalam pembinaan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol Kabupaten Majalengka.

Setelah menyampaikan uraian-uraian di atas, peneliti memiliki kepedulian terhadap permasalahan tersebut, sehingga merasa perlu untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam yang dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah skripsi yang berjudul **“Pembinaan Wawasan Kebangsaan Oleh Kantor Kesbangpol (Kesatuan Bangsa Dan Politik) Bagi Siswa SMA/SMK Di Kabupaten Majalengka”**.

B. Rumusan Masalah

Agar suatu penelitian yang dilakukan lebih terfokus dan mengarah sesuai dengan tujuan penelitian, maka perlu dirumuskan masalah-masalah yang diteliti. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. bagaimana pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan oleh Kantor Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) bagi siswa SMA/SMK di Kabupaten Majalengka?;
2. bagaimana kesan siswa SMA/SMK di Kabupaten Majalengka setelah pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan oleh Kantor Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik)?;
3. apa saja faktor penghambat dalam pembinaan wawasan kebangsaan oleh Kantor Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) bagi siswa SMA/SMK di Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada judul serta rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan oleh Kantor Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) bagi siswa SMA/SMK di Kabupaten Majalengka;
2. kesan siswa SMA/SMK di Kabupaten Majalengka setelah pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan oleh Kantor Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik);
3. faktor penghambat dalam pembinaan wawasan kebangsaan oleh Kantor Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) bagi siswa SMA/SMK di Kabupaten Majalengka.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan mengenai pembinaan wawasan kebangsaan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Kantor Kesbangpol

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi Kantor Kesbangpol dalam menentukan program dan kegiatan selanjutnya menuju ke arah yang lebih baik.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang perbaikan dalam pembinaan wawasan kebangsaan kepada siswa sehingga dapat mempertahankan eksistensi wawasan kebangsaan Indonesia.

2) Bagi Pihak Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak sekolah dalam menerapkan strategi yang tepat untuk ikut berperan dalam pembinaan wawasan kebangsaan kepada siswa.

E. Batasan Istilah

Ruang lingkup permasalahan perlu dipertegas agar penelitian lebih terarah, maka istilah-istilah dalam judul penelitian ini perlu diberi batasan.

1. Pembinaan

Pembinaan adalah upaya dan tindakan baik berupa program-program, pendidikan, pelatihan, dan pertemuan dengan tujuan untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan serta kecakapan seseorang. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pembinaan adalah upaya dan tindakan berupa program-program, kegiatan, dan

pelatihan mengenai wawasan kebangsaan untuk mengembangkan pengetahuan dan kecakapan siswa SMA/SMK di Kabupaten Majalengka.

2. Wawasan Kebangsaan

Secara singkat Wawasan Kebangsaan dapat dipahami sebagai cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri, bangsa, dan negaranya untuk mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Wawasan kebangsaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberikan dalam pembinaan wawasan kebangsaan oleh Kantor Kesbangpol bagi siswa SMA/SMK di Kabupaten Majalengka.

3. Siswa SMA/SMK

Siswa adalah murid yang biasanya bersekolah pada tingkat dasar dan menengah. Dalam penelitian ini siswa yang dimaksud adalah siswa SMA/SMK di Kabupaten Majalengka.

SMA Negeri yang ada di Kabupaten Majalengka berjumlah 16 sekolah, sedangkan SMA Swasta berjumlah 5 sekolah. Untuk jumlah SMK Negeri yang ada di Kabupaten Majalengka berjumlah 9 sekolah, dan jumlah SMK Swasta berjumlah 28 sekolah. Adapun daftar SMA/SMK di Kabupaten Majalengka tersebut terdapat di lampiran.

Lebih jelasnya lagi yang dimaksud siswa dalam penelitian ini adalah siswa SMA/SMK di Kabupaten Majalengka yang pernah mengikuti program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan pemantapan pemahaman wawasan kebangsaan, seperti pada tahun 2014 kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol diadakan di SMK Negeri 1 Palasah dan tahun 2015 diadakan di SMK Negeri 1 Maja.

4. Kantor Kesbangpol

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Majalengka yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 tahun 2009 yang dalam tugas pokok dan fungsinya memelihara dan menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan pada aparatur penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para siswa SMA/SMK di Kabupaten Majalengka yang pernah mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan yang diadakan oleh Kantor Kesbangpol.

Untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Kantor Kesbangpol menyusun Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 sebagai panduan kerja operasional yang visioner sekaligus sebagai instrumen politik dalam keseluruhan kerangka manajemen program di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pencapaian tujuan dan sasaran dengan strategi yang meliputi program yang akan dilaksanakan, diaktualisasikan, dan diimplementasikan selama satu tahun anggaran 2016 oleh Kantor Kesbangpol Kabupaten Majalengka salah satunya adalah program Pengembangan Wawasan Kebangsaan yang melihat permasalahan bahwa masih kurangnya jiwa nasionalisme di lingkungan generasi muda. Oleh sebab itu, Kantor Kesbangpol Kabupaten Majalengka mengadakan kegiatan pemantapan pemahaman wawasan kebangsaan.

Dari uraian di atas maka yang dimaksud Kantor Kesbangpol pada penelitian ini adalah Kantor Kesbangpol Kabupaten Majalengka yang termasuk dalam Lembaga Teknis Daerah beralamat di Jalan Gerakan Koperasi Nomor 38 Majalengka dan Kasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan bagi siswa SMA/SMK di Kabupaten Majalengka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Deskripsi Teoretis

1. Pembinaan

Pembinaan adalah suatu proses hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu (Thoha, 1999:243). Pembinaan juga merupakan suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan, dan mengembangkan.

Pembinaan merupakan suatu usaha atau kegiatan memberi bimbingan. Bimbingan merupakan arti dari kata '*guidance*' berasal dari kata dasar '*guide*' yang mempunyai beberapa arti, yaitu: (a) menunjukkan jalan (*showing the way*), (b) memimpin (*leading*), (c) memberikan petunjuk (*giving instruction*), (d) mengatur (*regulating*), (e) mengarahkan (*governing*), dan (f) memberi nasehat (*giving advice*). Istilah '*guidance*' juga diterjemahkan dengan arti bantuan, tuntunan serta pertolongan (Tohirin, 2007:16).

Dari beberapa definisi di atas, jelas bagi kita maksud dari pembinaan itu sendiri dan pembinaan tersebut bermuara pada adanya perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, yang diawali

dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan (Santosa, 2010:139).

Menurut Wahjosumidjo (2002:244), ada dua faktor yang menentukan keberhasilan pembinaan, pertama, jalur atau wadah sebagai wahana untuk melaksanakan pembinaan; kedua, substansi atau materi yang dijadikan bahan pembinaan yang betul-betul bermanfaat dalam membina pola pikir, sikap, dan perilaku. Pembinaan wawasan kebangsaan oleh Kantor Kesbangpol bagi siswa SMA/SMK di Kabupaten Majalengka, Kantor Kesbangpol sebagai wadah dan materi empat konsensus dasar negara, bela negara, cinta tanah air, pembinaan rohani, penanggulangan dampak pengaruh penggunaan narkoba, materi PBB, materi outbound sebagai materi yang dijadikan bahan pembinaan. Dengan wadah dan materi tersebut, dapat menentukan keberhasilan pembinaan wawasan kebangsaan.

Selain pendukung pembinaan, ada faktor-faktor yang menghambat pembinaan, baik hambatan dari dalam dan dari luar. Menurut Hasan Alwi (dalam Rauf, 2009:2) menyatakan bahwa hambatan berasal dari kata hambat yang diartikan “membuat sesuatu perjalanan/pekerjaan menjadi lambat atau tidak lancar” dan secara terpisah hambatan diartikan “halangan atau rintangan”.

Sebelum pelaksanaan kegiatan pembinaan dilakukan berbagai perencanaan atau persiapan. Secara umum perencanaan merupakan proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu

yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu (Kunarjo, 2002:14).

2. Wawasan Kebangsaan

Ki Hajar Dewantara (dalam Kodhi dan Soejadi, 1994:95) mengemukakan pendapatnya mengenai kebangsaan sebagai berikut:

Rasa kebangsaan adalah sebagian dari rasa kebatinan kita manusia, yang hidup dalam jiwa kita dengan sengaja. Asal mulanya rasa kebangsaan itu tumbuh dari rasa diri yang terbawa keadaan perikehidupan kita, lalu menjalar menjadi rasa keluarga, rasa ini terus jadi rasa hidup bersama (rasa sosial). Adapun rasa kebangsaan itu sebagian dari atau sudah terkandung di dalam arti perkataan rasa hidup bersama-sama itu, sedangkan adakalanya rasa kebangsaan itu berujud dengan pasti sebagai angan-angan yang kuat dan mengalahkan segala perasaan lain-lainnya. Wujudnya rasa kebangsaan itu umumnya ialah dalam mempersatukan kepentingan bangsa dengan kepentingan diri sendiri, nasibnya sendiri, kehormatan bangsa adalah kehormatan diri, demikian seterusnya.

Menurut S.A. Kodhi, wawasan kebangsaan terdiri dari kata wawasan dan kebangsaan. Wawasan berasal dari kata “wawas” yang dalam bahasa mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggapan inderawi, dan dalam istilah lain wawasan mengandung arti paham atau keyakinan tentang suatu hal, cara pandang, cara tinjauan, dan cara tanggap inderawi. Kebangsaan berasal dari kata bangsa atau “*nation*” yang diartikan sebagai kelompok manusia berasal dari keturunan nenek moyang yang sama (Nuryanti, 2014:129).

Cara pandang bangsa Indonesia itu juga merupakan perwujudan dialog dinamis bangsa Indonesia dengan lingkungannya sepanjang sejarahnya dan juga dengan kondisi geografisnya. Kondisi alamiah Indonesia yang tergelar secara tipikal memberikan suatu karakteristik

dalam persepsi diri dan konsepsi pengembangan dirinya (Kodhi dan Soejadi, 1994:97)

Dan dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar yang ketika jaman kerajaan Majapahit disatukan dalam wadah nusantara, maka wawasan kebangsaan yang seharusnya dibangun adalah wawasan nusantara, karena cakupan pengetahuan anak bangsa haruslah bersifat universal di seantero wilayah nusantara. Keluasan pandangan ini kemudian diharapkan dapat membentuk kesamaan nilai untuk tetap bersatu dan menjaga keutuhan bersama untuk tetap berada dalam rangkulan dan balutan NKRI (Mahifal, 2011:8).

Sedangkan wawasan nusantara menurut Prof. Wan Usman (dalam Winarno, 2007:143) adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.

Secara sederhana wawasan nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia sendiri serta nusantara sebagai lingkungan tempat tinggalnya (Winarno, 2007:143).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a. Pancasila

1) Arti Pancasila

Berkenaan dengan istilah/perkataan “Pancasila”, Prof. Mr. Muhammad Yamin selanjutnya menulis dalam bukunya yang lain berjudul *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia* pada halaman 437 antara lain sebagai berikut: “Perkataan Pancasila”, yang kini telah menjadi istilah hukum, mula-mulanya ditempa dan dipakai oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 untuk menamai paduan sila yang lima. Perkataan itu diambil dari peradaban Indonesia lama sebelum abad XIV (Kansil dan Kansil, 2011:14).

Ir. Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 berkata “...saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya adalah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi” (Alam, 2000:30).

Kata kembar itu kedua-duanya berasal dari bahasa Sansekerta Panca dan Sila. Dalam bahasa Sansekerta, Pancasila ada dua macam artinya. Pancasila dengan huruf i biasa artinya: berbatu sendi yang lima (*consisting of 5 rocks; aus fünf Felsen bestehend*); pancasila dengan huruf i yang panjang bermakna “5

peraturan tingkah laku yang penting”. Kata sila juga hidup dalam kata kesusilaan dan kadang-kadang juga berarti etika (Kansil dan Kansil, 2011:14).

2) Kedudukan dan Peranan Pancasila

“...tiga kedudukan dan peran atau fungsi Pancasila yang ditegaskan oleh lembaga tertinggi negara MPR, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai dasar negara, dan Pancasila sebagai ideologi nasional...” (Gultom dan dkk, 1997:5).

3) Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Setiap bangsa yang ingin berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai sangat memerlukan pandangan hidup. Dengan pandangan hidup bangsa inilah suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta memecahkan secara tepat. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan besar yang akan timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia (Kansil dan Kansil, 2003:7).

Pandangan hidup bangsa adalah intisari (kristalisasi) dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu, dan yang diyakini kebenarannya, yang berdasarkan pengalaman sejarah, dan yang

telah menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari (Kansil dan Kansil, 2011:24).

Dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan bangsa yang dicita-citakan, mengandung dasar pikiran terdalam, dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik (Kansil dan Kansil, 2003:7).

Bangsa Indonesia yang menyadari akan nilai-nilai yang dimilikinya, kemudian menuangkan dalam konsep teoritis tentang cita-cita dan keyakinan yang menjadi landasan kehidupan bersama dalam bernegara. Pancasila yang menjadi dasar filsafat dan pandangan hidup bangsa, secara operasional dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai konsensus politik, di dalamnya menjanjikan suatu komitmen untuk bersatu dalam sikap dan pandangan dalam menuju hari depan bangsa Indonesia yang lebih cerah, yang dicita-citakan bersama (Suyahmo, 2014:60).

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tersebut terkandung di dalamnya konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Oleh karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai hidup dalam masyarakat Indonesia, maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya

karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Dengan demikian pandangan hidup Pancasila dari bangsa Indonesia yang *Bhinneka Tunggal Ika* tersebut harus merupakan asas pemersatu bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman (Kaelan, 2010:109).

4) Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila dalam pengertian ini sering disebut sebagai dasar Falsafah Negara, *Philosophische Grondslag* dari Negara, Ideologi Negara, *Staatsidee* (Marsudi, 2006:8).

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: "...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Keputusan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar bagi Negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 kita temukan dasar negara

“Pancasila”. Oleh karena itu, secara yuridis Pancasila sah menjadi dasar negara Republik Indonesia (Kansil dan Kansil, 2011:29).

Akibat hukum disahkannya Pancasila sebagai dasar negara, maka seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat haruslah didasari oleh Pancasila. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara memberi akibat hukum dan filosofis; yaitu kehidupan negara dari bangsa ini haruslah berpedoman kepada Pancasila (Kansil dan Kansil, 2011:29).

Selanjutnya Pancasila sebagaimana yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut dituangkan dalam wujud berbagai aturan-aturan dasar/pokok seperti yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945 dalam bentuk pasal-pasal, yang kemudian dijabarkan lagi ke dalam berbagai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat serta peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu sekedar mengenai bagian yang tertulis, sedangkan yang tidak tertulis terpelihara dalam konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan (Marsudi, 2006:8).

5) Pancasila Sebagai Ideologi Negara Republik Indonesia

Ideologi berasal dari kata Yunani *Idein*, yang berarti melihat, atau *Idea* yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikir, dan *Logia* yang berarti ajaran (Marsudi, 2006:65).

Ideologi negara dalam arti cita-cita negara, atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk

seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan, pada hakikatnya merupakan asas kerohanian, yang antara lain memiliki cita-cita sebagai berikut.

1. Mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan.
2. Oleh karena itu, ideologi mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamankan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban (Santosa dkk, 2002:52-53).

Menurut Prof. Notonegoro (dalam Wreksosuhardjo, 2001:11-12), “jadi Pancasila sebagai ideologi Negara Republik Indonesia berarti cita-cita Negara Republik Indonesia yang menjadi basis bagi teori dan praktek penyelenggaraan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pada pendiriannya ini beliau mengatakan bahwa bagi Negara Republik Indonesia, istilah ideologi hanya tepat dikenakan pada Pancasila saja...”. Dapat kita perhatikan di situ bahwa Pancasila bagi negara Republik Indonesia adalah dasar filsafat negara yang sekaligus juga menjadi cita-cita negara. Bahwa sebagai cita-cita negara dapat kita baca anak kalimat terakhir Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “...dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia”. Maka dari itu tujuan negara seperti termuat di dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” itu dirumuskan demikian dengan maksud agar tercapai cita-cita negara, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Maksudnya ialah masyarakat sesuai dengan yang dikehendaki oleh sila kelima Pancasila, yang diwarnai oleh keempat sila lainnya dari Pancasila.

b. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Menurut Kansil dan Kansil (2011:10), “Apabila kita berbicara tentang UUD 1945, maka yang dimaksudkan ialah Konstitusi (UUD) yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut pada tanggal 18 Agustus 1945 yang diumumkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun 1946 No. 7, halaman 45-48...”.

Sunarto (2012:59) menyatakan bahwa konstitusi disusun dan ditetapkan tentunya dengan tujuan tertentu. Secara umum dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Untuk itu maka dalam konstitusi ditentukan

kerangka bangunan suatu negara, kewenangan pemerintah sebagai pihak yang berkuasa, serta hak-hak asasi warga negara.

Adapun bagian pasal-pasal dari UUD 1945 berisi pokok-pokok dari isi konstitusi. Setelah dilakukan amandemen sebanyak 4 kali maka jumlah pasal menjadi 73 pasal ditambah 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan (Winarno, 2007:81).

Menurut Winarno, 2007:81) secara garis besar isi dari bagian pasal-pasal UUD 1945 adalah sebagai berikut.

- 1) Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan (Pasal 1).
- 2) Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 2 sampai Pasal 4)
- 3) Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara (Pasal 5 sampai 16 (Bab IV tentang DPA dihapus)),
- 4) Bab V tentang Kementerian Negara (Pasal 17).
- 5) Bab VI tentang Pemerintah Daerah (Pasal 18 sampai 18B).
- 6) Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19 sampai 22B).
- 7) Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 22C sampai 22D).
- 8) Bab VIIB tentang Pemilihan Umum (Pasal 22E)
- 9) Bab VIII tentang Hal Keuangan (Pasal 23 sampai 23D).
- 10) Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23E sampai 23G).

- 11) Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 sampai 25).
- 12) Bab IXA tentang Wilayah Negara (Pasal 25A).
- 13) Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk (Pasal 26 sampai 28).
- 14) Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Dasar Negara (Pasal 28A sampai 28J).
- 15) Bab XI tentang Agama (Pasal 29).
- 16) Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara (Pasal 30).
- 17) Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan (Pasal 31 sampai 32).
- 18) Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (Pasal 33 sampai 34).
- 19) Bab XV tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Pasal 35 sampai 36C).
- 20) Bab XVI tentang Perubahan Undang-Undang Dasar (Pasal 37).

c. Bhinneka Tunggal Ika

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951, Pasal 5 yang berbunyi: “Di bawah lambang tertulis dengan huruf latin sebuah semboyan dalam bahasa Jawa-Kuno, yang berbunyi: “BHINNEKA TUNGGAL IKA”.

Dalam kitab Sutasoma Mpu Tantular menulis:

Hyang buddha tanpahi Civa raja deva Rvanekadhatu vinuvus, vara-Buddha vicva; bhinneka rakva ring apa kena parvvanosen mangka Jinatva lavan Civatva tunggal, Bhinneka tunggal ika, tan hana dharma mangrva.

“Dewa Buddha tidak berbeda dari Civa Mahadewa diantara dewa-dewa, keduanya dikatakan banyak mengandung unsur Buddha yang mulia adalah unsur kesemestaan, bagaimanakah mereka yang boleh dikatakan tak terpisahkan dapat begitu saja dipisahkan menjadi dua? Jina dan Jiwa Civa adalah satu. Mereka memiliki ciri-ciri berlainan, tetapi mereka adalah satu, dalam hukum tidak terdapat dualisme” (Kern dalam Isdaryanto, 1996:67).

Selain itu menurut Suhandi Sigit (dalam MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2013:181) bunyi lengkap dari ungkapan *Bhinneka Tunggal Ika* dapat ditemukan dalam Kitab *Sutasoma* yang ditulis oleh Mpu Tantular pada abad XIV di masa kerajaan Majapahit. Dalam kitab tersebut Mpu Tantular menulis “*Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa, Bhineki rakwa ring apan kena parwanosen, Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal, Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa*” (Bahwa agama Buddha dan Siwa (Hindu) merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belah, tetapi satu jua, artinya tak ada dharma yang mendua). Nama Mpu Tantular sendiri terdiri dari *tan* (tidak) dan *tular* (terpengaruh), dengan demikian, Mpu Tantular adalah seorang Mpu (cendekiawan, pemikir) yang berpendirian teguh, tidak mudah terpengaruh oleh siapa pun) (Suhandi Sigit dalam MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2013:181).

Menurut Rizal (dalam Isdaryanto, 1996:62) menyatakan bahwa kata “*Bhinneka*” berasal dari kata “*Bhinneka+Ika*” yang berarti “berbeda-beda itu”, “*Tunggal*” artinya satu, “*Ika* yang berarti itu”. Jadi

istilah “Bhinneka Tunggal Ika” secara etimologis berarti: Berbeda-beda itu dalam satu itu.

Istilah Bhinneka Tunggal Ika yang semula mewujudkan semangat “toleransi” keagamaan, kemudian diangkat menjadi lambang Negara Indonesia, ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 51 tentang Lambang Negara. Dalam pada itu, mengenai arti semboyan: “Bhinneka Tunggal Ika”, Prof. Supomo menjelaskan, bahwa maksudnya ialah: “Menghubungkan daerah-daerah dan suku-suku bangsa di seluruh Nusantara Indonesia menjadi “Kesatuan Raya” (Isdaryanto, 1996:62).

“Bhinneka Tunggal Ika” semboyan Indonesia yang mencerminkan negara terdiri dari berbagai sukubangsa, etnis, dan agama, tetapi terintegrasi dalam ke-ikaan dan kesatuan. Masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai keragaman tersebut sering disebut sebagai masyarakat “multikultural” (Octaviani, 2013:113).

Bhinneka Tunggal Ika juga dapat ditafsirkan sebagai *‘Ben Ika Tunggale Ika’* (baca: *Ben Iko Tunggale Iko*) (Bahasa Jawa). Kata *‘Ben’* artinya ‘biarpun’, kata *‘ika’* dibaca *‘iko’* yang artinya ‘itu’ atau ‘ini’ dengan menunjuk seseorang atau sekelompok orang didekatnya atau di luar kelompoknya. Kata *‘tunggale’* artinya *‘sedulur’* atau ‘saudara’. Jadi kalimat di atas dapat dimaknai menjadi: ‘Biarpun yang itu/ini saudaranya yang itu/ini’ dan lebih jauh, makna dari Bhinneka Tunggal Ika adalah *‘paseduluran’* atau ‘persaudaran’. Dengan

persaudaraan sebagai keluarga besar yang dilahirkan oleh ibu pertiwi yang bernama Indonesia, maka kewajiban untuk mengamankan, menjaga kehormatan, memelihara hubungan, saling menghormati, membangun dan mengembangkan dirinya, adalah kewajiban para anggota dalam suatu keluarga Indonesia. Oleh karena itu, sebagai suatu keluarga, keberagaman dan keberbedaan harus dipahami sebagai kewajaran dan sebuah fitrah yang harus disyukuri dan diselaraskan, untuk menjamin keberlangsungan hidup keluarga Indonesia dalam rangka mencapai tujuan keluarga tersebut. ini cara memaknai Bhinneka Tunggal Ika dari sisi lain, dengan logika dan penafsiran lokal (Sujanto, 2007: 3-4).

d. Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menurut Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014 (2013:167), negara kesatuan adalah konsep ketatanegaraan yang mengatur hubungan kekuasaan (*gezagsverhouding*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sedangkan persatuan adalah sikap batin atau semangat kolektif untuk bersatu dalam ikatan kebangsaan dan negara.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”.

Pasal yang dirumuskan oleh PPKI tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada 1928 yang

dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan, satu tanah air yaitu Indonesia (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2012:171).

3. Pentingnya Wawasan Kebangsaan

Menurut Tim Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden RI (dalam Wildan, 2009:154) wawasan kebangsaan pada hakikatnya adalah kesamaan persepsi dari segenap komponen bangsa Indonesia sebagai dasar bagi terbangunnya rasa dan semangat nasional yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional. Wawasan kebangsaan akan menjadi daya dorong untuk berbuat, mempersembahkan, dan mendarmabaktikan karya terbaik bagi bangsa dan negara. Lebih dari itu, hakikat wawasan kebangsaan menghendaki dimilikinya sikap untuk segera mengakhiri kesetiaan terhadap kelompok (partai, golongan, suku bangsa) atau perseorangan, begitu kesetiaan terhadap bangsa dan negara diperlukan.

Pendidikan wawasan kebangsaan diperlukan untuk memantapkan rasa dan sikap nasional yang tinggi, rasa senasib sepenanggungan, sebangsa setanah air, satu tekad bersama yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorang, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah di segala bidang untuk mencapai tujuan nasional. Hal ini, bukanlah berarti menghilangkan kepentingan orang per orang, kelompok, suku bangsa, atau daerah, melainkan tetap menghormati, mengakui, dan memenuhi, selama tidak bertentangan

dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak (Wildan, 2009:154).

Sesungguhnya wawasan kebangsaan secara jelas dapat memberikan jaminan atas tercapainya kepentingan nasional baik ke dalam maupun keluar. Hal ini berarti bahwa wawasan kebangsaan memberikan gambaran dan arah yang jelas bagi kelangsungan hidup bangsa, sekaligus perkembangan kehidupan bangsa dan negara di masa depan.

Penataan kehidupan berbangsa dan bernegara, harus berjalan di atas rel kesepakatan bersama, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan seloka Bhinneka Tunggal Ika (Wildan, 2009:156).

Dari keterangan di atas jelas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan atau pembinaan wawasan kebangsaan sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia termasuk remaja di dalamnya. Menurut Azwar A (dalam Azinar, 2013:154) pada umumnya remaja memiliki rasa ingin tahu tinggi (*high curiosity*). Remaja cenderung ingin berpetualangan menjelajah segala sesuatu dan mencoba segala sesuatu yang belum pernah dialaminya. Apalagi dengan adanya globalisasi yang mempermudah masuknya pengaruh budaya asing yang akhirnya dapat memudarkan semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda.

Selain dapat memudarkan semangat nasionalisme dan patriotisme karena kurangnya wawasan kebangsaan para remaja atau generasi muda,

banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi para remaja sekarang ini, seperti radikalisme, kenakalan remaja, seks bebas, dan penyalahgunaan narkoba.

a. Radikalisme

Radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan pergantian terhadap suatu pemerintahan di masyarakat yang dalam setiap aksinya menggunakan kekerasan, dan suka memaksakan kehendak (Aryani, 2015:6).

Setidaknya, radikalisme bisa dibedakan ke dalam dua level, yaitu level pemikiran dan level aksi atau tindakan. Pada level pemikiran, radikalisme masih berupa wacana, konsep dan gagasan yang masih diperbincangkan, yang intinya mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Adapun pada level aksi atau tindakan, radikalisme bisa berada pada ranah sosial-politik dan agama. Pada ranah politik, paham ini tampak tercermin dari adanya tindakan memaksakan pendapatnya dengan cara-cara yang inkonstitusional, bahkan bisa berupa tindakan mobilisasi massa untuk kepentingan politik tertentu dan berujung pada konflik sosial (Munip, 2012:162).

Menurut Fanani (2013:6) yang memprihatinkan, semenjak beberapa tahun terakhir ini gerakan radikalisme sudah masuk ke dunia pendidikan dan kalangan kaum muda. Fenomena bom bunuh diri, bom di Serpong, terendusnyanya jaringan NII (Negara Islam

Indonesia) beberapa waktu lalu mengkonfirmasi bahwa gerakan radikal banyak menyusupkan pemahaman dan memperluas jangkauan jaringannya melalui kampus dan sekolah. Para mahasiswa dan siswa yang masih berada dalam proses pencarian identitas diri dan tahap belajar mengenal banyak hal, menjadi sasaran yang paling strategis untuk memperkuat gerakan radikalisme keagamaan ini. Terlebih lagi, posisi strategis mahasiswa dan siswa mempunyai jangkauan pergaulan luas dan relatif otonom, dianggap oleh gerakan radikal sebagai sarana yang paling pas dan mudah untuk memproliferasi (usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan) paham-paham yang mereka perjuangkan.

Selanjutnya menurut Fanani (2013:7) ketika siswa dan generasi muda yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa di berbagai tingkatan dan bidang ini sudah terinfiltrasi pemahaman radikal, kita tentu patut menyatakan keprihatinan terhadap nasib bangsa Indonesia ke depan. Tentu banyak faktor yang menyebabkan fenomena radikalisme dikalangan kaum muda ini, mulai dari soal eksklusifisme paham keagamaan, krisis identitas, aksi identitas, hingga soal gejala krisis sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

b. Kenakalan Remaja

Masa remaja awal merupakan masa transisi, dimana usianya berkisar antara 13 sampai 16 tahun atau yang biasa disebut dengan usia belasan yang tidak menyenangkan, dimana terjadi juga

perubahan pada dirinya baik secara fisik, psikis, maupun secara sosial. Pada masa transisi tersebut kemudian dapat menimbulkan masa krisis, yang ditandai dengan kecenderungan munculnya kenakalan. Pada kondisi tertentu kenakalan tersebut akan menjadi perilaku yang mengganggu (Saad dalam Patinus dkk, 2014:1).

Remaja memiliki karakternya masing-masing. Coon (dalam Zubaedi, 2011:8) mendefinisikan karakter sebagai suatu penilaian subjektif terhadap kepribadian seseorang yang berkaitan dengan atribut kepribadian yang dapat atau tidak dapat diterima masyarakat. Karakter merupakan keseluruhan kodrati dan disposisi yang telah dikuasai secara stabil yang mendefinisikan seseorang individu dalam keseluruhan tata perilaku psikisnya yang menjadikan tipikal dalam cara berfikir dan bertindak.

Menurut Santrock (dalam Aviyah dan Farid, 2014:127) mengartikan kenakalan remaja sebagai kumpulan dari berbagai perilaku, dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial sampai tindakan kriminal.

Kenakalan remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat

membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang.

Menurut Patinus (2014:2) bentuk kenakalan remaja tersebut seperti kabur dari rumah, membawa senjata tajam, dan kebut-kebutan di jalan, sampai pada perbuatan yang sudah menjurus pada perbuatan kriminal atau perbuatan yang melanggar hukum seperti: pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, seks bebas, pemakaian obat-obatan terlarang, dan tindakan kekerasan lainnya. Salah satu faktor penyebab timbulnya kenakalan remaja adalah tidak berfungsinya orangtua sebagai figur teladan bagi anak. Selain itu suasana keluarga yang menimbulkan rasa tidak aman dan tidak menyenangkan serta hubungan keluarga yang kurang baik dapat menimbulkan bahaya psikologi bagi setiap usia terutama pada masa remaja.

c. Seks Bebas

Menurut Azwar A (dalam Azinar, 2013:154) pada umumnya remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi (high curiosity). Remaja cenderung ingin berpetualang menjelajah segala sesuatu yang belum pernah dialaminya. Selain didorong juga oleh keinginan menjadi seperti orang dewasa menyebabkan remaja ingin mencoba

melakukan apa yang sering dilakukan orang dewasa termasuk yang berkaitan dengan masalah seksualitas.

Menurut Abdillah (2013:4), pengertian seksual secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan. Namun pada saat ini nampaknya pengertian hubungan seks telah mengalami pergeseran makna. Jika dulu hubungan seks hanya dilakukan oleh pasangan suami istri namun saat ini banyak remaja bahkan remaja di bawah umur yang telah melakukan hubungan seks tanpa adanya ikatan pernikahan atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan *free sex*.

Menurut Crooks (dalam Silvia, 2009:11), hubungan seks bebas dibagi menjadi dua macam yaitu seks pranikah dan seks ekstra nikah (*extra marital sex*). Seks pranikah adalah hubungan seks yang dilakukan seseorang sebelum menikah. Biasanya hubungan seks bebas ini merupakan suatu hal yang sangat serius bagi kaum perempuan karena kelemahan serta kerapuhan mereka, tekanan dari pasangan untuk berhubungan seksual lebih sering mereka dapatkan dengan alasan sebagai tanda pembuktian cinta, selain itu mereka juga cenderung dipaksa untuk tidak menggunakan kondom ketika pertama kali melakukan *intercourse*. Sementara sex extra nikah (*extra marital sex*) adalah hubungan yang dilakukan seseorang selain kepada suami atau istrinya.

d. Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan obat (zat) merupakan suatu pola penggunaan zat yang bersifat merusak, paling sedikit 1 bulan, sehingga menimbulkan gangguan dalam pekerjaan, belajar, dan pergaulan (Wicaksana dalam Purnomowardani dan Koentjoro, 2000:61).

Narkoba (Narkotika dan obat-obat berbahaya) mempunyai istilah-istilah lain yang juga sering digunakan seperti zat adiktif, zat psikoaktif, dan zat psikotropika. Yang dimaksud dengan obat psikoaktif adalah jenis zat yang dapat mengubah pikiran dan perasaan karena pengaruh secara langsung terhadap susunan saraf pusat (otak dan susunan tulang belakang) (Purnomowardani dan Koentjoro, 2000:61).

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menurut Badri M (dalam Sholihah, 2015:155) penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) biasa didasari atas beberapa hal yang menyebabkan seseorang menjadi penyalahgunaan NAPZA. Pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar. Pertama, sebab-sebab yang berasal dari faktor individu seperti penyalahgunaan, sikap, kepribadian, jenis kelamin, usia, dorongan kenikmatan, perasaan ingin tahu, dan untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi. Kelompok kedua berasal dari lingkungannya seperti pekerjaan, ketidakharmonisan keluarga, kelas sosial ekonomi, dan tekanan kelompok

4. Pembinaan Wawasan Kebangsaan

Pembinaan merupakan suatu usaha atau kegiatan memberi bimbingan. Bimbingan merupakan arti dari kata '*guidance*' berasal dari kata dasar '*guide*' yang mempunyai beberapa arti, yaitu: (a) menunjukkan jalan (*showing the way*), (b) memimpin (*leading*), memberikan petunjuk (*giving instruction*), (d) mengatur (*regulating*), (d) mengarahkan (*governing*), dan (e) memberi nasehat (*giving advice*). Istilah '*guidance*' juga diterjemahkan dengan arti bantuan, tuntunan serta pertolongan (Tohirin, 2007:16).

Semangat dan wawasan kebangsaan menjadi penting untuk ditumbuh-kembangkan, karena rasa kebangsaan sebagai *manifestasi* dari rasa cinta tanah air, pada gilirannya membangkitkan kesadaran kita akan arti mahal dan bernilai rasa kesatuan dan persatuan bangsa ini. Wawasan

kebangsaan meliputi mawas ke dalam dan mawas ke luar. Mawas ke dalam artinya memandang kepada diri bangsa Indonesia sendiri yang memiliki wilayah tanah air yang luas, jumlah penduduk yang banyak, keanekaragaman budaya, yang harus diletakkan dalam satu pandangan berdasarkan pada kepentingan bersama sebagai bangsa. Mawas ke luar, yaitu memandang terhadap lingkungan sekitar Negara-negara tetangga dan dunia internasional. Bangsa Indonesia harus memiliki integritas dan kredibilitas yang kuat dalam memainkan peranannya di dunia internasional sebagai bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Dengan demikian, wawasan kebangsaan menjadi penting untuk ditanamkan kepada setiap warganegara Indonesia, sehingga wawasan kebangsaan ini harus benar-benar terealisasi dalam kehidupan nyata sehari-hari (Alfian, 2014:9-10).

Hakikat dari wawasan kebangsaan itu sendiri adalah keutuhan Nasional, dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkungan nusantara dan demi kepentingan nasional.

Wawasan kebangsaan yang merupakan salah satu sikap atau sifat mengenal lebih dekat dan mempelajari bangsanya agar menimbulkan rasa nasionalisme dalam jiwa mereka. Di dalam pendidikan wawasan kebangsaan harus ditanamkan kepada siswa agar siswa dapat menghargai bangsanya dan pahlawannya serta bangga akan bangsanya yaitu Indonesia (Alfian, 2014:10).

Selain itu dengan pembinaan wawasan kebangsaan siswa diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan diri baik di sekolah maupun lingkungan sekolah. Disiplin berasal dari bahasa latin, diciplia yang diambil dari kata discere yang maknanya belajar. Istilah ini berkembang menjadi instruksi, hukuman dalam pengertian mendidik kepatuhan akan norma dan peraturan termasuk tata tertib (Sallad dalam Sutrisno, 2011:61).

Bentuk indiscipliner siswa antara lain, perilaku membolos, terlambat masuk sekolah, ribut di kelas saat guru sedang menjelaskan mata pelajaran, tidak mengenakan atribut sekolah secara lengkap, dan menyontek (Widodo dalam Widosari, 2014:57).

a. Bentuk kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan antara lain:

- 1) pelatihan/*training of facilitator*;
- 2) *outbound*;
- 3) lomba cerdas cermat;
- 4) permainan;
- 5) diskusi/dialog; dan
- 6) seminar dan lokakarya.

b. Pendekatan pendidikan wawasan kebangsaan

- 1) Pembangunan karakter bangsa;
- 2) Pelibatan kerjasama multipihak;
- 3) Keterbukaan;
- 4) Kreatifitas;

- 5) Integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan; dan
 - 6) Penggalian dan penggunaan muatan lokal.
- c. Materi pendidikan wawasan kebangsaan meliputi:
- 1) Pancasila;
 - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 3) Bhinneka Tunggal Ika; dan
 - 4) Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Muatan materi pendidikan wawasan kebangsaan meliputi:
- 1) Pancasila:
 - a) Perspektif historis.
 - b) Makna dan fungsi Pancasila:
 - (1) Pancasila sebagai dasar negara;
 - (2) Pancasila sebagai ideologi;
 - (3) Pancasila sebagai falsafah;
 - (4) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - (5) Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
 - (6) Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.
 - c) Landasan teoritis sila demi sila Pancasila.
 - d) Aktualisasi Pancasila.
 - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - a) Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan.
 - b) Paham konstitusionalisme dan negara hukum.

- c) Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - d) Tema-tema pokok dalam batang tubuh;
 - e) Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - f) Aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Bhinneka Tunggal Ika
- a) Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis.
 - b) Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika.
 - c) Perkembangan Ke-Bhinnekaan.
 - d) Landasan teoritis.
 - e) Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
- 4) Negara Kesatuan Republik Indonesia:
- a) Perspektif historis.
 - b) Makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis.
 - c) Landasan Teoritis.
 - d) Mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permendagri Nomor 71 Tahun 2012)

Pembinaan wawasan kebangsaan oleh Kantor Kesbangpol bagi siswa SMA/SMK di Kabupaten Majalengka biasanya menggunakan bentuk kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Ceramah

Sanjaya (2010:147) bahwa metode ceramah dapat diartikan sebagai cara menyajikan pelajaran melalui penuturan atau penjelasan langsung kepada sekelompok siswa.

b. Diskusi

Sabri (dalam Lamajau, 2014:203) menyatakan bahwa, diskusi suatu kegiatan kelompok untuk memecahkan suatu masalah dengan maksud untuk mendapat pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu, atau untuk menampung keputusan bersama. Dalam diskusi, tiap orang diharapkan memberikan sumbangan sehingga seluruh kelompok kembali dengan pemahaman yang sama dalam suatu keputusan dan kesimpulan.

c. Tanya Jawab

Menurut Lalu Muhammad (dalam Nuraisiyah, 2008:7), metode tanya jawab adalah cara menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk pertanyaan dari guru yang harus dijawab siswa atau sebaliknya, baik secara lisan maupun tulisan.

Daryanto (dalam Risovi, 2014:30) menyatakan bahwa, tujuan metode tanya jawab adalah:

- 1) menciptakan suasana yang hidup (setiap peserta ikut serta dan aktif) dalam KBM;
- 2) menggali ide-ide peserta;

- 3) memberikan rangsangan kepada peserta/siswa untuk merumuskan ide/ide yang tergal dengan menggunakan kalimat sendiri;
- 4) mengetahui posisi pemahaman siswa terhadap tema yang dibahas;
- 5) menciptakan kesempatan bagi peserta untuk lebih mengonsolidasikan pemahamannya;
- 6) memberikan kesempatan bagi peserta untuk berani berkomentar.

d. *Outbound*

Inti dari *Outward Bound* program adalah “*development by challenge*” (perubahan berdasarkan pengalaman) seperti yang diungkapkan sang penggagas Kurt Hahn dari hasil filosofi, buah pikir, dan kegigihannya akan pengembangan program pendidikan yang cocok untuk generasi muda. Hahn menekankan bahwa *outward bound* sebagai training yang melibatkan pikiran yang diteruskan ke tubuh dengan berusaha memberikan pengalaman menantang kepada para pemuda dengan format pengajaran yang merangsang *inner strength*, karakter, dan perubahan. Program yang diberikan meliputi kemampuan berorganisasi, *rescue training*, tantangan fisik, dan *adventure*. Selintas medium pengajaran yang digunakan menitik beratkan pada fisik semata, tetapi dibalik itu sangat berefek pada ranak psikologis dan sosial (Neill dalam Wijanarko, 2011: 28)

Menurut Ancok (dalam Wijanarko, 2011:25), alasan kenapa metode *outbound* digunakan antara lain:

- 1) Metode ini sebagai sebuah simulasi kehidupan yang kompleks menjadi sederhana.
- 2) Metode ini menggunakan pendekatan metode belajar dari pengalaman (*experiential learning*).
- 3) Metode ini penuh kegembiraan karena dilakukan dengan permainan.

e. PBB (Peraturan Baris Berbaris)

Menurut Buku Panduan Resimen Mahasiswa, baris-berbaris adalah suatu wujud latihan fisik, diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup angkatan bersenjata yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu.

Maksud dan tujuan PBB diantaranya adalah

- 1) Guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas rasa persatuan, disiplin, sehingga dengan demikian senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas diatas kepentingan individu dan secara tidak langsung juga menanamkan rasa tanggungjawab.
- 2) Yang dimaksud dengan menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok tersebut dengan sempurna.

- 3) Yang dimaksud dengan rasa persatuan adalah adanya rasa senasib dan penanggungan serta ikatan batin yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas.
- 4) Yang dimaksud dengan disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu yang hakekatnya tidak lain adalah keikhlasan individu.
- 5) Yang dimaksud dengan rasa tanggungjawab adalah keberanian untuk bertindak yang mengandung resiko terhadap dirinya tetapi menguntungkan tugas atau sebaliknya tidak mudah melakukan tindakan yang akan dapat merugikan kesatuan.

5. Kantor Kesbangpol Kabupaten Majalengka

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintah daerah, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Di sini yang dimaksud dengan Gubernur adalah yang memimpin daerah tingkat

provinsi, Bupati untuk Kabupaten, sedangkan Walikota untuk tingkat kota.

Terkait perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Atas dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka Kabupaten Majalengka membentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. Lebih jelasnya terdapat dalam Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka terlampir.

Perangkat daerah kabupaten/kota yang salah satunya adalah lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Lembaga teknis daerah dalam Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka terdiri atas:

- a. Badan Kepegawaian Daerah;
- b. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;
- c. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- d. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- e. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

- g. Kantor Arsip Daerah;
- h. Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka;
- i. Rumah Sakit Umum Daerah Cideres.

Diantara badan, kantor, dan rumah sakit umum daerah yang termasuk dalam lembaga teknis daerah Kabupaten Majalengka, terdapat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kantor Kesbangpol) yang melaksanakan berbagai program diantaranya adalah program kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan.

Kantor Kesbangpol Kabupaten Majalengka memiliki sejarah, struktur organisasi, serta visi dan misi seperti yang dijelaskan di bawah.

a. Sejarah Kesbangpol

Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa tantangan utama yang akan dihadapi oleh Bangsa dan negara Indonesia kedepan yaitu bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan serta mewujudkan sistem politik yang demokratis. Tantangan ini sekaligus juga akan menjadi dasar penentuan arah pembangunan politik dalam negeri kita ke depan yang pada dasarnya berdimensi dua, yaitu dimensi penguatan persatuan dan kesatuan serta pembangunan sistem politik demokrasi.

Dengan mempertimbangkan bobot dan tanggung jawab pemerintah di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan pembangunan politik dalam negeri di masa yang akan datang maka Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten

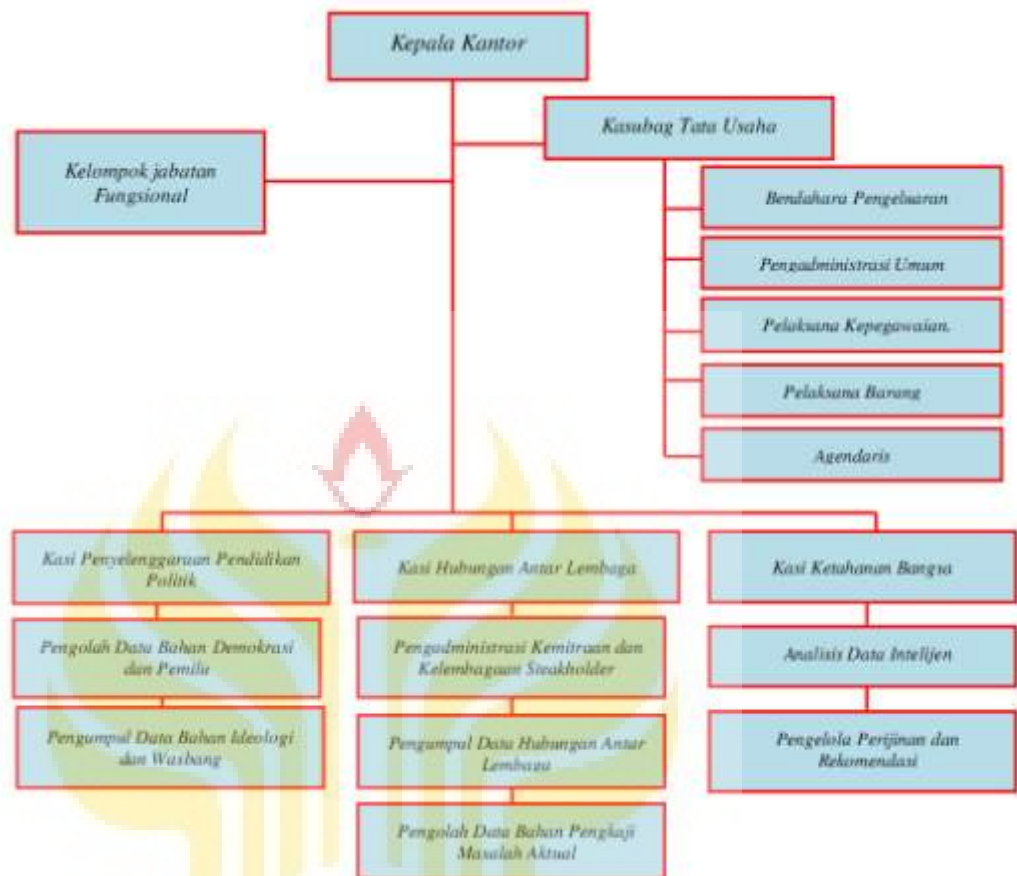
Majalengka telah mengalami perubahan dan perkembangan menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Nomenklatur Kantor tersebut telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009.

Hal ini mengingat bahwa tugas, fungsi dan tanggung jawab pembinaan kesatuan bangsa tanggung jawab pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat, sebagai komponen terdepan penyelenggaraan dan pelayanan publik (<http://kesbangpol.majalengkakab.go.id/sejarah-kesbangpol/> Diakses Senin, 25 Januari 2015, 14.00 WIB).

b. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka mempunyai susunan organisasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor.
- 2) Kasubag Tata Usaha.
- 3) Kasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.
- 4) Kasi Hubungan Antar Lembaga.
- 5) Kasi Ketahanan Bangsa.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.



Bagan 1: Struktur Organisasi Kantor Kesbangpol

<http://kesbangpol.majalengkakab.go.id/struktur-organisasi/> (Senin, 25 Januari 2015, 13.53 WIB)

Adapun yang menyelenggarakan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan bagi siswa SMA/SMK di Kabupaten Majalengka adalah pegawai Kantor Kesbangpol Kasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

c. Visi dan Misi

1) Visi

Visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka, yaitu:

“Mantapnya Persatuan dan Kesatuan Berbangsa dan Bernegara serta Kehidupan yang Demokratis dan Partisipatif Menuju Masyarakat yang Makmur”.

2) Misi

Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka, yaitu sebagai berikut:

- a) Mewujudkan masyarakat Majalengka yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap daerahnya sendiri;
- b) Mewujudkan kemampuan, kekuatan dan kemauan masyarakat untuk memelihara dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) Mewujudkan masyarakat yang partisipatif dalam pembelaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d) Mewujudkan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah (<http://kesbangpol.majalengkakab.go.id/visi-dan-misi/> Diakses Senin, 25 Januari 2015, 14.28 WIB).

B. Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan

Ada beberapa penelitian yang didasarkan atas materi wawasan kebangsaan seperti skripsi yang berjudul “Penanaman Wawasan Kebangsaan di Pondok Pesantren Melalui Pembelajaran Sejarah”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 oleh Nuryanti mahasiswa Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP Veteran Semarang. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengajaran sejarah pada MA di Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta kurang baik, hal ini disebabkan oleh rendahnya kompetensi guru, profesionalisme guru dan media kurang dimanfaatkan secara optimal serta tidak sesuai sistem evaluasi. Dalam pengajaran sejarah, kebanyakan masih bersifat konvensional, yaitu guru hanya menyampaikan fakta-fakta sejarah dan kurang berupaya menanamkan wawasan kebangsaan pada diri santri, oleh karena adanya beberapa hambatan yang ditemui yaitu terbatasnya waktu dan minat santri.

Penelitian lain yang berbentuk skripsi dengan materi penanaman wawasan kebangsaan dilakukan pada tahun 2014 oleh Thoriq Dwi Alfian mahasiswa program studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, yang berjudul “Penanaman Nilai Wawasan Kebangsaan dan Patriotisme Melalui Pembelajaran Sejarah di SMA Negeri 1 Wonosari Klaten”. Hasil penelitian menunjukkan: (1) proses pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Wonosari dilakukan oleh guru dengan selalu menyiapkan perangkat pendukung pembelajaran seperti program tahunan, program semester dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Proses

pembelajaran di SMA Negeri 1 Wonosari sudah berjalan dengan baik; (2) usaha guru dalam menanamkan nilai wawasan kebangsaan dan patriotisme di SMA Negeri 1 Wonosari juga menggunakan strategi-strategi dalam penanamannya. Strategi yang digunakan oleh guru SMA Negeri 1 Wonosari dalam penanaman nilai wawasan kebangsaan dan patriotisme adalah dengan menerapkan pembelajaran aktif, menggunakan media, dan metode yang baik untuk menanamkan nilai wawasan kebangsaan dan patriotisme; (3) kendala yang dihadapi dalam penanaman nilai wawasan kebangsaan dan patriotisme antara lain kurangnya alokasi waktu pelajaran dan adanya siswa yang kurang memperhatikan materi, sehingga membuat penyampaian materi dan proses penanaman wawasan kebangsaan dan patriotisme kurang maksimal.

Selanjutnya penelitian yang didasarkan atas lokasi yang berada di Kantor Kesbangpol seperti skripsi yang berjudul “Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pemberdayaan Nasionalisme Pemuda Kepulauan Riau”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 oleh Azfina Julyara mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. Hasil penelitian yang ditemukan adalah bahwa Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan Badan pelaksana pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan nasionalisme masyarakat yang termasuk di dalamnya pemuda Kepulauan Riau belum melaksanakan fungsinya di Bidang pembinaan wawasan kebangsaan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya program kerja yang dilaksanakan, rendahnya akses pemuda untuk

berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan, kurangnya/tidak adanya dana yang dibutuhkan dalam menjalankan program kerja, tidak adanya tim penelitian dan evaluasi terhadap hasil kebijakan yang dijalankan dan kurangnya sensitifitas pencegahan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu sendiri.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan dengan mengambil judul “Pembinaan Wawasan Kebangsaan Oleh Kantor Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) Bagi Siswa SMA/SMK di Kabupaten Majalengka”, penulis rasa belum ada penelitian seperti penelitian yang penulis lakukan dengan lokasi Kantor Kesbangpol Majalengka dan materi wawasan kebangsaan atau pembinaan wawasan kebangsaan oleh Kantor Kesbangpol bagi siswa.

C. Kerangka Berpikir

Globalisasi seperti akibat kemajuan dalam bidang telekomunikasi, transportasi, dan media cetak maupun elektronik dapat merubah tata kehidupan masyarakat Indonesia. Globalisasi dapat menjadi modal positif bagi kehidupan masyarakat menjadi lebih baik apabila dihadapi dengan benar. Tetapi apabila sebaliknya akan berakibat berubahnya tata kehidupan masyarakat dan menurunnya wawasan kebangsaan masyarakat. Padahal seharusnya di era globalisasi ini wawasan kebangsaan menjadi sangat penting untuk dimiliki oleh masyarakat.

Maka perlu adanya upaya menanamkan, menumbuhkan, dan memelihara atau dalam kata lain melakukan pembinaan wawasan kebangsaan

masyarakat sebagai warganegara. Salah satu lembaga resmi pemerintah yaitu Kantor Kesbangpol Kabupaten Majalengka yang mengadakan program wawasan kebangsaan dengan kegiatan pemantapan pemahaman wawasan kebangsaan kepada siswa SMA/SMK di Kabupaten Majalengka sebagai fokus perhatiannya.

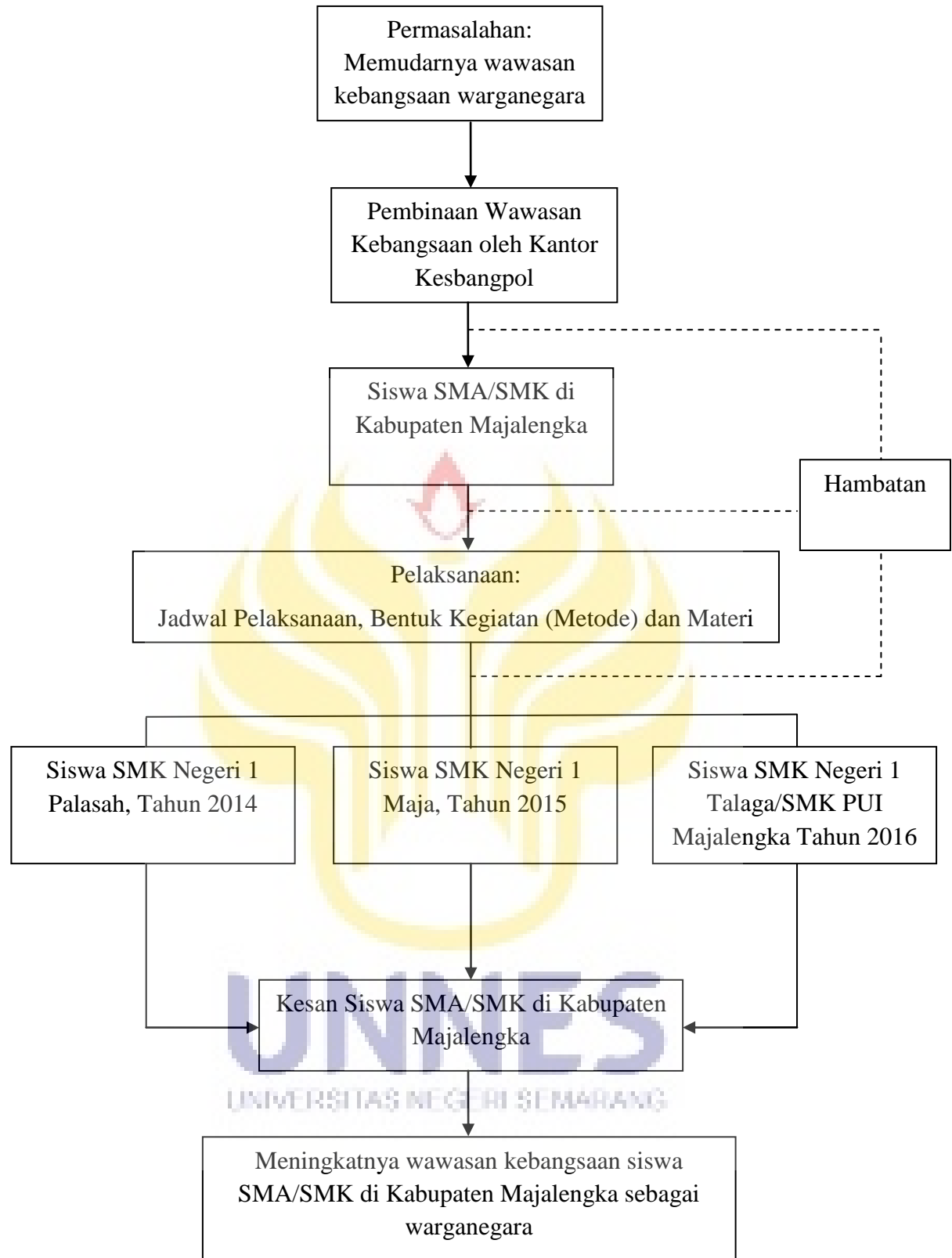
Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan oleh Kantor Kesbangpol menggunakan pendekatan dan metode yang telah direncanakan, serta materi yang telah disusun. Pelaksanaan kegiatan tersebut diadakan di SMA/SMK di Kabupaten Majalengka, seperti pada tahun 2014 diadakan di SMK Negeri 1 Palasah, tahun 2015 di SMK Negeri 1 Maja, dan tahun 2016 Kantor Kesbangpol merencanakan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan tersebut akan diadakan di SMA Negeri 1 Talaga atau di SMK PUI Majalengka. Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan tersebut diharapkan memberikan kesan positif kepada siswa, berupa pemahaman-pemahaman terkait wawasan kebangsaan.

Setiap kegiatan yang dilakukan pasti akan mengalami hambatan-hambatan, sama halnya pada kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan tersebut. Hambatan dapat berasal dari mulai Kantor Kesbangpol itu sendiri saat akan menentukan sekolah mana yang menjadi sasaran sampai pada selesainya pelaksanaan kegiatan tersebut. Hambatan juga tidak hanya berada pada sisi Kantor Kesbangpol saja, tapi dari pihak sekolah dan siswa juga dapat mengalami berbagai hambatan, baik sebelum dan setelah kegiatan.

Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan tersebut memiliki indikator keberhasilan. Ketidaksiuaian antara kesan siswa dengan indikator yang telah ditentukan oleh Kantor Kesbangpol akan menimbulkan hambatan dalam pencapaian tujuan. Semakin kecil hambatan yang ada, semakin besar tujuan pencapaian yang diperoleh atau semakin meningkatnya wawasan kebangsaan siswa SMA/SMK di Kabupaten Majalengka sebagai warganegara Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka disusunlah kerangka berpikir yang terkait dengan pembinaan wawasan kebangsaan oleh Kantor Kesbangpol bagi siswa SMA/SMK di Kabupaten Majalengka.





Bagan 2: Kerangka Berpikir

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembinaan wawasan kebangsaan oleh Kantor Kesbangpol bagi siswa SMA/SMK di Kabupaten Majalengka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan oleh Kantor Kesbangpol bagi siswa SMA/SMK di Kabupaten Majalengka diadakan lintas instansi atau bekerjasama dengan instansi lain, diantaranya adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Kodim 0617 Majalengka, Polres Majalengka. Materi yang disampaikan diantaranya adalah: nilai-nilai dasar dan makna bela negara, pembinaan rohani dalam konteks peningkatan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, penanggulangan dampak negatif pengaruh penggunaan narkoba bagi generasi muda, cinta tanah air melalui peningkatan pemahaman wawasan nusantara, materi pembinaan lapangan PBB, *outbound*, jaring laba-laba, jaring pendarat, pengenalan alat penolong dini, pengembangan diri, dan renungan malam. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab yang dilaksanakan di dalam ruangan, serta metode *outbound* dan PBB yang dilaksanakan di luar ruangan. Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan di SMK Negeri 1 Palasah dilaksanakan pada libur semester, sedangkan di SMK Negeri 1 Maja dilaksanakan pada hari KBM.

2. Kesan siswa SMK Negeri 1 Palasah terkait waktu pelaksanaan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan tahun 2014 oleh Kantor Kesbangpol dirasakan sudah sesuai karena dilaksanakan pada libur semester sehingga siswa dapat mengisi waktu libur dengan mengikuti kegiatan tersebut. Siswa SMK Negeri 1 Maja yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan tahun 2015 merasa tidak masalah kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari KBM karena untuk kelas XI KBM diganti dengan kegiatan tersebut, sedangkan kelas X diberikan dispensasi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan atau paling berkesan bagi siswa adalah bentuk kegiatan *outbound*. Materi wawasan kebangsaan yang dianggap memerlukan pemahaman yang lebih bagi siswa adalah materi UUD 1945.
3. Faktor penghambat pembinaan wawasan kebangsaan oleh Kantor Kesbangpol bagi siswa SMA/SMK di Kabupaten Majalengka tahun 2014 di SMK Negeri 1 Palasah dan tahun 2015 di SMK Negeri 1 Maja diantaranya adalah kurangnya prasarana dan sarana pendukung kegiatan, seperti prasarana ruangan, sarana *microphone*, *sound system*, dan alat pendingin ruangan.

B. Saran

1. Bagi Kantor Kesbangpol Kabupaten Majalengka

Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, Kantor Kesbangpol harus lebih meningkatkan komunikasi serta kerjasama dengan pihak sekolah dan Kodim 0617 Majalengka dalam hal keamanan untuk menjaga peserta. Kantor Kesbangpol membuat peraturan kegiatan

yang lebih tegas untuk peserta sehingga peserta mengikuti kegiatan dengan baik dan disiplin. Selain itu Kantor Kesbangpol dapat membagi peserta menjadi beberapa kelompok kemudian menempatkannya di kelas sesuai jumlah kelompok dan pemateri bergantian memberikan materi pada setiap kelas.

2. Bagi sekolah

a. SMK Negeri 1 Palasah

SMK Negeri 1 Palasah ikut berperan dalam pelaksanaan kegiatan seperti ikut memantau peserta saat mengikuti kegiatan. Sekolah juga dapat membantu menyediakan prasarana pendukung kegiatan seperti MCK sementara untuk memenuhi prasarana MCK bagi 400 siswa peserta kegiatan dan prasarana ruangan atau aula. Selain itu ikut membantu menyediakan sarana pendukung kegiatan seperti *microphone, soundsystem*, dan alat pendingin ruangan.

b. SMK Negeri 1 Maja

Sama seperti SMK Negeri 1 Palasah, SMK Negeri 1 Maja pun diharapkan dapat ikut berperan dalam memantau peserta pada saat mengikuti kegiatan dan dapat membantu menyediakan sarana pendukung kegiatan seperti *microphone, soundsystem*, dan alat pendingin ruangan untuk memperlancarkan proses kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alam, Wawan Tunggul. 2000. *Bung Karno Menggali Pancasila (Kumpulan Pidato)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Amin, Maswardi Muhammad. 2011. *Pendidikan Karakter Anak Bangsa*. Jakarta: Baduose Media Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Baedowi, Ahmad dkk. (Ed.) 2013. *Arus Pemikiran Islam dan Sosial (Menghalau Radikalisme Kaum Muda: Gagasan dan Aksi)*. Jakarta: MAARIF Institute for Culture and Humanity.
- Gultom, R.M.S, dkk. 1997. *Ideologi, Konstitusi dan Pembangunan Nasional*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Pendidikan Pancasila*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*. 2003. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2011. *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kodhi, S.A. dan R. Soejadi. 1994. *Filsafat, Ideologi, dan Wawasan Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Mahbubi, M. 2012. *Pendidikan Karakter: Implementasi Aswaja Sebagai Nilai Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Marsudi, Al Subandi. 2006. *Pancasila dan UUD '45 Dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Laxy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: UI Press.

- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. 2013. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Putra, Nusa. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral*. Semarang: Unnes Press.
- Sanjaya, Wina. 2010. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Santosa, Heru, dkk. 2002. *Sari Pendidikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Beserta Perubahannya*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Santosa, S. 2010. *Statistik Multivariat Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Soegito, Ari Tri. 2013. *Nasionalisme, Wawasan Kebangsaan, dan Pembinaan Karakter Bangsa*. Semarang: Widya Karya Utama.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sujanto, Bedjo. 2007. *Pemahaman Kembali Makna Bhineka Tunggal Ika Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: CV Sagung Seto.
- Sunarto. 2012. *Dasar-Dasar Pemahaman Hukum Tata Negara*. Semarang: UPT Unnes Press.
- Suyahmo. 2014. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Thoha, Miftah. 1999. *Perilaku Organisasi-Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tohirin. 2007. *Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Wahjosumidjo. 2002. *Kepemimpinan dan Motivasi dalam Kepemimpinan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Winarno. 2007. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Bumi Kasara.

Wreksosuhardjo, Sunarjo. 2001. *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Andi.

Zubaedi. 2011. *Desain Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal

Alfian, Thoriq Dwi. 2014. *Penanaman Nilai Wawasan Kebangsaan dan Patriotisme Melalui Pembelajaran Sejarah di SMA Negeri 1 Wonosari Klaten*. Dalam e-Journal UNY. Hal. 9-10.

Aviyah, Evi dan Muhammad Farid. 2014. *Religiusitas, Kontrol Diri dan Kenakalan Remaja*. Dalam Pesona, Jurnal Psikologi Indonesia. Vol 3. No 02. Hal 126-129.

Azinar, Muhammad. 2013. *Perilaku Seksual Pranikah Berisiko Terhadap Kehamilan Tidak Diinginkan*. Dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat. Vol 8. No 2. Hal 154-160.

Lamajau, Eresia. 2014. *Peningkatan Kemampuan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas V SDN Sampaka Kec. Bualemo Kab. Banggai Melalui Metode Diskusi Kelompok*. Dalam Jurnal Kreatif Tadulako Online. Vol 5. No 1. Hal 201-211.

Munip, Ahmad. 2012. *Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah*. Dalam Jurnal Pendidikan Islam. Vol I. No 2. Hal 160-181.

Nuryanti. 2014. *Penanaman Wawasan Kebangsaan di Pondok Pesantren Melalui Pembelajaran Sejarah*. Dalam Majalah Ilmiah Pawiyatan. No 1. Hal 129.

Octaviani, Laila. 2013. *Pandataran dan Jarlatsuh: Model Pendidikan Multikultural di SMA Taruna Nusantara Magelang*. Dalam Jurnal Komunitas-Unnes. Hal 113.

Patinus, dkk. 2014. *Kenakalan Remaja di Kalangan Siswa-Siswi SMPN 07 Sengah Temila Kecamatan Sengah Temila*. Dalam Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS. Hal 1-15.

Rauf, Akhmad Wahyuddin. 2009. *Deskripsi Tentang Hambatan Guru dalam Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMU Negeri 4 Watampone*. Vol I. No 1.

- Sholihah, Qomariyatus. 2015. *Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA*. Dalam Jurnal Kemas. Vol IX. No 1. Hal 153-159.
- Silvia. 2009. *Netralisasi Perilaku Seks Bebas (One Night Stand) Pada Perempuan Dewasa Muda (Studi Kasus 2 Perempuan Dewasa Muda)*. Dalam Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol V. No II. Hal 9-18.
- Sutrisno, Heru. 2009. *Kasus Perilaku Disiplin Siswa di Sekolah Ditinjau dari Kerangka Teori Sosiologi Fungsionalisme*. Dalam Jurnal Pendidikan Inovatif. Vol 4. No 2. Hal 60-66.
- Wildan, Dadan. 2009. *Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Era Reformasi Gelombang Kedua Untuk Mewujudkan Visi Indonesia 2025*. Dalam Jurnal Sekretariat Negara RI. No 14. Hal 150.
- Purnomowardani, Agnes Dewanti dan Koentjoro. 2000. *Penyingkapan-Diri, Perilaku Seksual, dan Penyalahgunaan Narkoba*. Dalam Jurnal Psikologi Universitas Gadjah Mada. No 1. Hal 61-72.
- Wulandari, Meiyanti. 2014. *Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Melalui Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Dalam Jurnal Ilmiah PPKn IKIP Veteran Semarang. Vol 2. No 1. Hal 44-53.

Skripsi

- Isdaryanto, Noorochmat. 1996. *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Suasana Kebatinan Bagi Rekayasa Sosial Dalam Perspektif Filsafat Proses A.N. Whitehead*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM.
- Nuraisiyah, Iis. 2008. *Perbedaan Penguasaan Konsep Sistem Indera Antara Siswa yang Diajar dengan Metode Brainstorming dan Metode Tanya Jawab*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah.
- Risovi, Zulhani. 2014. *Keterampilan Bertanya Guru dalam Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah.
- Wijanarko, Wahyu. 2011. *Pengaruh Metode Outbound terhadap Pembentukan Karakter Kepemimpinan Karakter Siswa Sekolah Alam Indonesia*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Psikologi.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan kebangsaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Web

Angling, Adhitya Purbaya. 2016. *ABG Berpose Injak Patung Pahlawan, Ketua MPR: Wawasan Kebangsaan Memudar*. <http://news.detik.com/berita/3206420/abg-berpose-injak-patung-pahlawan-ketua-mpr-wawasan-kebangsaan-memudar> (diakses Minggu, 12 Juni 2016).

Ahmad, Sudarno. 2015. *Pemuda Alami Krisis Wawasan Kebangsaan*. <http://www.kebumenekspress.com/2015/10/pemuda-alami-krisis-wawasan-kebangsaan.html> (diakses Jumat, 29 Januari 2016).

<http://kesbangpol.majalengkakab.go.id>.

Setiawan, Erwin. 2016. *Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, ABM “Pemuda Harus Menjadi Pelopor Bela Negara*. <http://www.polewaliterkini.com/sosialisasi-wawasan-kebangsaan-abm-pemuda-harus-menjadi-pelopor-bela-negara/> (diakses Senin, 13 Juni 2016).



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGA
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 MAJA

Prog. Studi Keahlian : Agribisnis Prod. Tanaman - Elektronika - Komputer & Informatika
Jl. Pasukan Sindangkasih Maja Tlp./ Fax. (0233) 282480 Majalengka 45461



SURAT KETERANGAN

Nomor : 828/ 87 /SMKN 1/III/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala SMK Negeri 1 Maja Kabupaten Majalengka :

Nama : **UDIN WAHYUDIN,S.IP,M.Si**
NIP. : 19650705 198903 1 017
Pangkat/Gol. : Pembina IV/a
Jabatan : Kepala Sekolah
Instansi : SMK Negeri 1 Maja

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **FIRSTANTY PRAVEIRA PHILEIN**
NIM : 3301412022
Program Study : PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)

Bahwa mahasiswa tersebut diatas adalah benar-benar telah menyelesaikan kegiatan Penelitian Sebagai Bahan Penyusunan Skripsi Pada Tanggal 10 Maret s/d 12 Maret 2016 di SMK Negeri 1 Maja dengan Judul Skripsi " *Pembinaan Wawasan Kebangsaan Oleh Kantor Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) Bagi Siswa SMA/SMK di Kabupaten Majalengka* ".

Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Majalengka, 15 Maret 2016

Kepala SMK Negeri 1 Maja



UDIN WAHYUDIN ,S.IP,M.Si

Pembina

NIP. 19650705 198903 1 017